

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi, Hukum Perbankan suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan. Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- E. Y. Kanteer dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Penerbit Storia Grafika, 2002.
- Gerry A. Perguson dalam Alma Manuputty Pattileuw, Jurnal Ilmu Hukum Clavia: Money Laundering Suatu Kejahatan yang Berdimensi Internasional, Makassar, Fakultas Hukum Universitas "45".
- James Alm. *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*, Georgia State University, International Studies Program, Working Paper, October 1998,
- Jimly Asshidique, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- Jimly Asshidique dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Oyok Abuyamin, Pilar-Pilar Perpajakan, Bandung., Adoya Mitra Sejahtera, 2014
- P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru , 1997
- PJA. Adriani, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Eresco Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Moeljatno., Asas-asas Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997
- Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Prenada Media Group, 2016.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

Tim Pandom Media, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta, Pandom Media Nusantara, 2014.

Webster New Twentieth Century Dictionary, Edisi Kedua, Dikutip dari Ihdhal Kasim, *Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti*, dalam *Majalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, No.2 Tahun I, Agustus 2000, Jakarta

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Sistem Pidana*, Jakarta, Grasindo, 2008.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2009

Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

#### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

### C. Rujukan Elektronik

[https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/090759950/rp-11-400-triliun-uang-indonesia-minginap-di-luar-negeri](https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/090759950/rp-11-400-triliun-uang-indonesia-menginap-di-luar-negeri) tanggal akses:29 Desember 2016, pukul 11:24

<http://forumpajak.org/fasilitas-pengampunan-pajak-tax-amnesty/> tanggal akses 30 Desember 2016, pukul 11.30

<https://www.tempo.co/read/kolom/2016/08/29/2378/korupsi-di-beleid-amnesti-pajak> akses 30 Desember 2016, pukul 16:30

<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2016/08/30/sasaran-utama-amnesti-pajak-orang-yang-simpan-uang-di-luar-negeri-378713> diakses tanggal 18 Februari 2017 Pukul 21:49

[https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/16\\_tppu-dalam-perspektif-hukum-internasional\\_x.pdf](https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/16_tppu-dalam-perspektif-hukum-internasional_x.pdf), diakses tanggal 21 Februari 2016

<http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses tanggal 13 Februari 2017 pukul 10.30 WIB

<http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk> diakses tanggal 22 Februari 2016 pukul 17:54

<http://kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas> diakses tanggal 22 Februari 2017 pukul 17:57

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html> diakses tanggal 18 Maret 2017 pukul 18:38

<http://www.kemenkeu.go.id/taxamnesty> diakses tanggal 21 maret 2017 pukul 23:34